

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada bulan Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Pengesahan ini menuai sorotan luas karena dilakukan secara kilat tanpa ruang deliberasi publik yang memadai. Dalam waktu kurang dari dua pekan, proses legislasi berjalan dari pembahasan hingga pengesahan. Banyak kalangan mengkritik prosedur tersebut karena dianggap melanggar prinsip keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses hukum (Akashi, 2025). Revisi yang dilakukan pun menyentuh pasal-pasal krusial mengenai peran militer dalam ranah sipil yang seharusnya berada di bawah otoritas sipil.

Poin utama dari kontroversi revisi UU TNI adalah kekhawatiran masyarakat sipil akan potensi kembalinya peran militer dalam kehidupan sipil. Beberapa pasal dinilai memberikan celah bagi militer untuk terlibat dalam urusan di luar fungsi pertahanan, seperti jabatan struktural di kementerian, peran dalam penanggulangan bencana, bahkan dalam kebijakan pendidikan (Dirgantara & Ardito, 2025). Sedangkan, setelah reformasi 1998, konsensus nasional menegaskan bahwa supremasi sipil harus dikedepankan untuk menjaga demokrasi. Banyak akademisi menilai bahwa revisi ini membuka kembali ruang abu-abu yang sebelumnya telah ditutup oleh semangat reformasi.

Isu ini menjadi penting karena menyangkut hubungan sipil-militer yang menjadi elemen fundamental dalam tata kelola negara demokratis. Dalam teori klasik hubungan sipil-militer, supremasi sipil berarti bahwa angkatan bersenjata harus tunduk di bawah otoritas sipil yang dipilih secara demokratis (Kemp & Hudlin, 1992). Ketika militer memasuki ranah non-pertahanan, maka terjadi distorsi terhadap prinsip dasar demokrasi. Sejarah Indonesia mencatat bahwa peran ganda militer di masa Orde Baru melalui konsep dwifungsi ABRI menciptakan dominasi militer yang menyusup ke berbagai aspek kehidupan sipil dan pemerintahan (Anwar, 2020).

Media massa tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara masyarakat memaknai sebuah peristiwa. Dalam teori konstruksi sosial atas realitas, media menjadi agen utama dalam mendefinisikan makna sosial melalui bahasa, narasi, dan struktur pemberitaan (Budisantoso, 1999). Pemberitaan tentang revisi UU TNI pun tidak netral, karena setiap media memiliki cara tertentu dalam menyoroti, menonjolkan, atau bahkan menutupi aspek tertentu dari isu tersebut.

Salah satu media yang konsisten dan memiliki pengaruh kuat dalam wacana publik di Indonesia adalah Tempo.co. Media ini dikenal luas karena gaya jurnalismenya yang investigatif dan kritis terhadap kebijakan negara. Dalam berbagai isu strategis, Tempo kerap menjadi acuan publik, akademisi, dan pengambil kebijakan. Pemilihan Tempo.co sebagai objek penelitian didasarkan pada kredibilitas, segmentasi pembaca yang berpendidikan tinggi, serta kecenderungannya untuk menyuarakan nilai-nilai demokratis. Dengan demikian,

analisis framing terhadap pemberitaan Tempo.co dapat memberikan gambaran yang tajam tentang bagaimana media memediasi isu RUU TNI kepada publik.

Periode 20-31 Maret 2025 dipilih karena merupakan waktu krusial ketika proses revisi RUU TNI berlangsung secara intensif di ruang legislatif dan media. Dalam rentang waktu tersebut, Tempo.co mempublikasikan sejumlah berita, opini, dan laporan mendalam yang menyajikan sudut pandang beragam. Pengumpulan data dari periode ini akan memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika framing yang terjadi secara real-time. Selain itu, periode ini juga merekam reaksi dari berbagai aktor sosial, termasuk lembaga sipil, tokoh militer, dan politisi.

Untuk membedah bagaimana konstruksi makna terbentuk dalam pemberitaan Tempo.co, penelitian ini menggunakan model framing dari Robert M. Entman (1993). Model Entman menekankan empat elemen dalam framing: *problem definition, causal interpretation, moral evaluation, dan treatment recommendation*. Dengan menganalisis elemen-elemen tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana Tempo.co mendefinisikan masalah, menyusun hubungan sebab-akibat, memberikan penilaian moral, dan menawarkan solusi atas isu revisi UU TNI.

Penggunaan teori framing sangat relevan dalam konteks media politik karena media tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga menyisipkan nilai dan sudut pandang tertentu dalam narasi pemberitaannya. Penelitian sebelumnya oleh Permadi et al., (2024) menunjukkan bahwa media cenderung menggunakan framing untuk menegaskan posisi ideologisnya, terutama dalam isu-isu strategis seperti politik, keamanan, dan kebijakan publik. Oleh karena itu, model Entman

memberikan kerangka yang sistematis dan komprehensif untuk membongkar lapisan makna di balik teks media.

Temuan dari studi-studi terdahulu juga mendukung pentingnya pendekatan framing dalam menilai independensi dan konsistensi media. Romadlan & Fauziah, (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa media online sering kali melakukan seleksi informasi yang mendukung narasi tertentu dan melemahkan suara kritis. Dalam konteks Tempo.co, perlu dikaji apakah media ini konsisten dengan prinsip-prinsip jurnalistik kritis atau justru menunjukkan preferensi naratif tertentu yang mendukung atau menolak revisi UU TNI.

Penelitian Sheehan (2013) juga menunjukkan bahwa framing oleh media arus utama dapat digunakan sebagai alat resistensi terhadap otoritarianisme. Dalam kasus pemberitaan revisi UU TNI, penting untuk mengevaluasi apakah Tempo.co mempertahankan posisi kritisnya atau mengalami penyesuaian terhadap tekanan politik. Framing yang tidak seimbang dapat menyesatkan opini masyarakat dan melemahkan akuntabilitas demokrasi.

Pemberitaan media bukan semata representasi fakta, tetapi juga bentuk produksi ideologis. Dalam konteks ini, framing menjadi instrumen simbolik yang memengaruhi persepsi publik secara sistematis. Entman (1993) menekankan bahwa media memiliki kekuatan untuk menyusun fakta dalam struktur narasi yang memperkuat makna tertentu dan menutupi makna lainnya. Oleh karena itu, penelitian framing harus mampu menangkap bias naratif tersebut serta mengidentifikasi pola-pola diskursif yang berulang.

Selain konteks teoritis, aspek metodologis juga diperhatikan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap makna secara mendalam dan kontekstual. Sebagaimana ditegaskan oleh (Anggito & Setiawan, 2018), penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial melalui interpretasi terhadap data yang bersifat naratif. Dalam hal ini, teks berita menjadi unit analisis utama. Pendekatan ini memberikan ruang eksploratif untuk membongkar representasi dan ideologi yang terkandung dalam wacana media. Prosesnya tidak berhenti pada pengumpulan data, tetapi juga pada interpretasi kritis terhadap pesan dan simbol yang dibentuk media.

Studi ini juga didasarkan pada pendekatan tekstual kritis, di mana setiap pemberitaan dianalisis bukan hanya dari struktur bahasanya, tetapi juga dalam konteks sosiopolitik yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan pemikiran Darmalaksana (2020), bahwa teks media adalah artefak budaya yang mengandung nilai, ideologi, dan kepentingan tertentu. Dengan pendekatan ini, analisis framing tidak bersifat deskriptif semata, tetapi juga interpretatif dan reflektif.

Penelitian ini memperkaya khazanah kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang komunikasi politik dan jurnalisme. Sebagian besar kajian sebelumnya lebih banyak fokus pada aspek struktural hubungan sipil-militer, seperti oleh Kosandi & Wahono (2020), sementara sedikit yang menelaah bagaimana media menjadi arena artikulasi konflik sipil-militer. Dengan kata lain, studi ini menghadirkan dimensi baru dalam melihat dinamika politik pertahanan, yakni melalui kaca mata representasi media digital.

Dalam ranah sosial, masyarakat sipil menunjukkan respons yang beragam terhadap isu ini. Beberapa kelompok sipil seperti akademisi, aktivis HAM, dan lembaga swadaya masyarakat menyuarakan kekhawatiran terhadap bangkitnya kembali peran dominan militer dalam ranah sipil Syarif & Suwartono (2025). Kritik tersebut didasarkan pada pengalaman historis bahwa militerisasi ruang sipil berdampak buruk terhadap kebebasan sipil, partisipasi politik, dan supremasi hukum. Oleh karena itu, media memiliki peran strategis dalam mengangkat suara-suara sipil ini agar tetap hadir dalam ruang publik sebagai bentuk resistensi terhadap regresi demokrasi.

Namun demikian, framing media yang terlalu netral atau bahkan condong membenarkan revisi UU TNI berpotensi menormalisasi dominasi militer. Dalam banyak kasus, media tunduk pada tekanan struktural dan ekonomi dari elit politik atau pemilik media yang memiliki afiliasi kekuasaan Akbar & Ayuning Hidayah (2019). Oleh karena itu, penting untuk menguji apakah Tempo.co berhasil menjaga independensinya atau terjebak dalam relasi kekuasaan yang kompleks.

Selain memberikan kontribusi terhadap teori framing dan komunikasi politik, penelitian ini juga memiliki signifikansi praktis. Bagi masyarakat umum, temuan studi ini dapat menjadi bahan refleksi kritis tentang bagaimana mereka dikonstruksi secara kognitif oleh media. Bagi jurnalis dan media, hasil penelitian ini dapat menjadi cermin evaluatif terhadap praktik pemberitaan dan posisi editorial mereka dalam isu-isu strategis kebangsaan. Dan bagi pengambil kebijakan, studi ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan kekuasaan sipil dan militer melalui proses legislasi yang transparan dan akuntabel.

1.2 Fokus Penelitian

Dengan mempertimbangkan konteks fenomena atau permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki beberapa fokus sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Tempo.co menggambarkan inti permasalahan (*define problem*) dalam pemberitaan pengesahan RUU TNI?
- 2) Bagaimana Tempo.co mengonstruksi aktor atau pihak yang dianggap sebagai penyebab utama (*diagnose cause*) dalam pemberitaan pengesahan RUU TNI?
- 3) Bagaimana Tempo.co menyampaikan penilaian moral (*make moral judgement*) terhadap kebijakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengesahan RUU TNI?
- 4) Bagaimana Tempo.co merepresentasikan solusi atau langkah penyelesaian yang disarankan (*treatment recommendation*) dalam pemberitaannya terkait pengesahan RUU TNI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus pertanyaan yang sudah dijelaskan dan tertulis diatas, maka dengan dilakukan penelitian ini tentunya memiliki beberapa tujuan:

- 1) Mengetahui bagaimana Tempo.co menggambarkan inti permasalahan (*define problem*) dalam pemberitaan pengesahan RUU TNI.
- 2) Menganalisis bagaimana Tempo.co mengonstruksi aktor atau pihak yang dianggap sebagai penyebab utama (*diagnose cause*) dalam proses pengesahan RUU TNI.

- 3) Mengkaji bagaimana Tempo.co menyampaikan penilaian moral (*make moral judgment*) terhadap kebijakan dan aktor yang terlibat dalam pengesahan RUU TNI.
- 4) Mengungkap bagaimana Tempo.co merepresentasikan solusi atau langkah penyelesaian (*treatment recommendation*) dalam narasi pemberitaannya terkait pengesahan RUU TNI.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan dalam pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian jurnalistik dan framing media. Secara khusus, penelitian ini memperkaya literatur ilmiah di bidang pemberitaan media digital dengan fokus pada isu pertahanan dan relasi sipil-militer.

Dalam perspektif ilmu komunikasi jurnalistik, penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai bagaimana konstruksi berita dilakukan oleh media arus utama seperti Tempo.co, baik melalui pilihan diksi, penekanan naratif, maupun seleksi sumber. Kajian ini menambah kedalaman analisis terhadap praktik framing yang digunakan media untuk membingkai isu-isu strategis dan kontroversial seperti pengesahan RUU TNI, yang memiliki implikasi besar terhadap demokrasi dan supremasi sipil.

Selain itu, penelitian ini relevan untuk mendukung pengajaran dan pengembangan mata kuliah seperti Jurnalisme Politik, Analisis Isi Media, Komunikasi Politik, dan Teori Framing Media. Penelitian ini diharapkan

mendorong pembaruan dalam pendekatan teoritis dan metodologis yang digunakan untuk menganalisis media digital. Penelitian ini juga berperan dalam membuka diskusi lintas disiplin antara komunikasi, ilmu politik, dan kajian militer, sehingga memperkaya perspektif akademik dalam memahami peran media sebagai aktor pembentuk opini publik dalam demokrasi.

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menawarkan manfaat nyata bagi para praktisi media, pengambil kebijakan, dan masyarakat umum. Bagi jurnalis dan redaktur, temuan dalam penelitian ini menjadi refleksi penting mengenai bagaimana praktik framing dapat memengaruhi cara publik memahami isu kebijakan strategis seperti RUU TNI. Hal ini mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga etika pemberitaan, keberimbangan informasi, serta akurasi dalam menyajikan suara dari berbagai pihak, baik sipil maupun militer.

Penelitian ini juga memberikan masukan bagi institusi media dalam merancang kebijakan editorial yang lebih transparan dan demokratis, terutama saat menghadapi isu-isu yang berpotensi membelah opini publik. Di sisi lain, bagi lembaga pengawas media seperti Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), maupun LSM pemantau media, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai kecenderungan bias dalam pemberitaan serta merumuskan pedoman etik dan kode perilaku jurnalistik yang lebih adaptif terhadap isu pertahanan dan demokrasi.

Bagi masyarakat luas, penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan literasi media. Dengan memahami bahwa pemberitaan tidak bersifat netral, tetapi

merupakan hasil konstruksi sosial, publik menjadi lebih kritis dalam membaca berita dan lebih bijak dalam membentuk opini. Penelitian ini juga membantu civitas akademika, mahasiswa komunikasi, dan peneliti selanjutnya dalam menjadikan isu-isu strategis seperti pengesahan RUU TNI sebagai bahan analisis ilmiah yang kaya dan kontekstual.

1.5 Landasan Pemikiran

1.5.1 Landasan Teoritis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Framing Theory yang dirumuskan oleh Robert M. Entman (1993), karena memberdayakan kerangka analitis yang kuat untuk menelaah bagaimana media daring membangun makna kebijakan publik melalui seleksi naratif. Entman menyatakan framing sebagai proses media memilih aspek tertentu dari realitas yang kemudian disorot untuk memengaruhi cara audiens memahami isu (Entman, 1993). Dalam praktik jurnalistik seperti Tempo.co, model empat fungsi framing, yaitu: *define problem, diagnose causes, make moral judgments, dan treatment recommendation*. Empat elemen tersebut memberikan instrumen sistematis untuk menganalisis bagaimana isu pengesahan RUU TNI direpresentasikan dalam struktur narasi berita (D'Angelo, 2012).

Berbagai riset empiris terkini memperkuat relevansi teori ini dalam konteks media online Indonesia. Penelitian lain dari (Dhamayanti et al., 2024) menggunakan framing Entman dan Pan & Kosicki untuk menelaah narasi media tentang relokasi ibukota, menunjukkan adanya variasi gerak wacana editorial di

antara platform media daring. Temuan ini mengonfirmasi bahwa framing bukan hanya fitur konten, tetapi juga ekspresi politik redaksional yang kontekstual.

Dalam pemberitaan kebijakan publik bersifat politik seperti Pilpres atau sidang MK, model Entman juga berhasil diterapkan. Studi oleh Harahap & Harahap (2024) menunjukkan bahwa Detik.com menggunakan framing untuk menekankan penilaian moral dan atribusi tanggung jawab dalam pemberitaan Pemilu 2024. Sementara studi tentang pemberitaan program siswa di berbagai media daring menyimpulkan bahwa narasi digerakkan oleh logika media yang memiliki bias substansial terhadap aspek moral dan ekonomi. Semua temuan ini menunjukkan bahwa framing Entman sangat relevan dalam memetakan bagaimana narasi dibentuk dalam konteks media digital.

Dalam situasi krisis, seperti pandemi Covid-19, penelitian (Adiprasetyo & Larasati, 2021) menerapkan model framing dalam jumlah besar (quantitative framing) untuk mengevaluasi pola tanggung jawab pemerintah dalam pemberitaan online Detik.com. Hasilnya menunjukkan frame atribusi tanggung jawab dan sentimen positif yang dominan terhadap pemerintah, sehingga framing tidak hanya bersifat normatif, tetapi memberi gambaran ideologis atas posisi media dalam krisis nasional.

Berdasarkan literatur tersebut, penggunaan Framing Theory Entman dalam penelitian ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga terbukti secara empiris dalam konteks media digital Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang terstruktur terhadap naskah berita, narasi editorial, dan pilihan sumber dalam pemberitaan RUU TNI periode Maret 2025 oleh Tempo.co. Dengan demikian,

penelitian ini bukan hanya menyumbang data lokal terbaru tentang framing media daring, tetapi juga memperkaya wacana akademis dalam studi jurnalisme politik dan komunikasi kritik media di era digital.

1.5.2 Kerangka Konseptual

1.5.2.1 Framing Media

Framing media merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana media tidak hanya menyampaikan informasi secara netral, tetapi juga secara aktif membentuk makna melalui proses seleksi dan penekanan aspek tertentu dari suatu peristiwa. Dalam kerangka Robert M. Entman (1993), framing mencakup empat elemen utama, yakni definisi masalah, atribusi penyebab, penilaian moral, dan penyelesaian masalah. Empat fungsi ini menjadi instrumen metodologis untuk mengurai bagaimana teks media merepresentasikan realitas sosial dan politik. Dalam konteks pemberitaan politik dan kebijakan publik, framing digunakan untuk membangun narasi dominan yang dapat mempengaruhi opini publik dan agenda politik.

Framing bukan sekadar representasi teknis atas peristiwa, melainkan juga mencerminkan posisi ideologis media. Artikulasi ideologi dalam proses framing dapat ditemukan dalam pilihan diksi, seleksi sumber, pemilihan sudut pandang, dan konstruksi narasi. Media, sebagai institusi sosial, kerap memosisikan dirinya terhadap isu tertentu sesuai dengan kepentingan ekonomi-politik, afiliasi redaksional, atau posisi independennya. Oleh karena itu, framing dilihat sebagai proses ideologis yang berkontribusi dalam pembentukan wacana publik dan arah

opini masyarakat terhadap isu-isu strategis, termasuk kebijakan pertahanan dan peran militer dalam kehidupan demokrasi.

1.5.2.2 RUU TNI 2025

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) tahun 2025 menjadi momen penting dalam diskursus sipil-militer di Indonesia. Salah satu poin kontroversial dalam revisi ini adalah perluasan fungsi TNI di luar urusan pertahanan, termasuk pelibatan dalam urusan sipil seperti keamanan dalam negeri, penanggulangan terorisme, dan penanganan konflik sosial. Revisi ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya pembelokan fungsi militer dari ranah pertahanan menuju peran domestik, yang secara prinsip bertentangan dengan semangat reformasi dan supremasi sipil pasca Orde Baru.

Dalam sistem demokrasi modern, prinsip supremasi sipil menempatkan institusi militer di bawah kendali otoritas sipil yang dipilih secara demokratis. Oleh karena itu, pengesahan RUU TNI 2025 bukan hanya merupakan urusan teknis hukum dan kelembagaan, tetapi juga menyangkut arah dan karakter sistem demokrasi Indonesia. Media memiliki peran penting dalam mengawal proses legislasi tersebut melalui pembentukan wacana publik yang kritis, edukatif, dan berbasis pada prinsip demokrasi konstitusional. Di sinilah pentingnya menganalisis bagaimana media membingkai isu tersebut dalam pemberitaan.

1.5.2.3 Media Daring Indonesia

Tempo.co merupakan salah satu media daring arus utama di Indonesia yang dikenal memiliki tradisi jurnalistik kritis, independen, dan mengedepankan standar profesionalisme tinggi. Media ini secara historis memiliki posisi yang kuat dalam

mengawal isu-isu politik dan kebijakan negara dengan pendekatan investigatif dan editorial yang tajam. Dalam konteks pemberitaan politik dan militer, Tempo.co kerap menjadi rujukan karena kapasitasnya menyampaikan informasi yang tidak sekadar faktual, tetapi juga reflektif terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas publik.

Karakter independensi Tempo.co penting untuk dianalisis dalam konteks framing karena sikap redaksional media sangat memengaruhi bagaimana isu dibingkai. Dalam kasus RUU TNI 2025, kemungkinan besar framing yang digunakan oleh Tempo.co mencerminkan posisi kritis terhadap pelebaran peran militer di ruang sipil. Sikap ini tidak lepas dari komitmen media terhadap prinsip checks and balances, perlindungan hak sipil, serta kontrol publik terhadap kekuasaan negara. Oleh karena itu, pemilihan Tempo.co sebagai objek dalam penelitian ini sangat relevan dalam menjawab pertanyaan bagaimana framing media digunakan untuk membentuk persepsi publik terhadap kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas terhadap sistem demokrasi.

1.5.2.4 Supremasi Sipil dan Demokrasi

Supremasi sipil dalam teori politik demokrasi menekankan pada kendali otoritas sipil atas lembaga militer, guna mencegah terjadinya dominasi militer dalam proses politik dan pengambilan kebijakan nasional. Prinsip ini menjadi salah satu fondasi utama dalam konsolidasi demokrasi di negara-negara pasca-otoritarian, termasuk Indonesia. Dalam konteks revisi RUU TNI 2025, perdebatan mengenai perluasan fungsi militer merefleksikan pergeseran dinamika relasi sipil-militer yang dapat berdampak pada stabilitas dan kualitas demokrasi.

Diskursus publik yang dibentuk oleh media memainkan peran strategis dalam memediasi pemahaman masyarakat terhadap supremasi sipil. Melalui framing, media tidak hanya menyampaikan kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif, tetapi juga menginterpretasikan nilai, konflik, serta implikasi kebijakan tersebut terhadap demokrasi dan hak warga negara. Oleh karena itu, analisis framing media dalam isu RUU TNI menjadi penting untuk menilai apakah media benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi atau justru memperkuat dominasi narasi negara. Dalam hal ini, kontribusi media terhadap demokrasi diukur bukan dari netralitas semata, tetapi dari keberanian dalam mengkritik kebijakan yang berpotensi mengancam prinsip-prinsip sipil dan kebebasan politik.

1.6 Langkah-langkah Penelitian

1.6.1 Subjek Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada pemberitaan pengesahan RUU TNI yang terdapat di rubrik politik dan hukum *Tempo.co* periode 20 – 31 Maret 2025 dengan situs resminya yang dapat diakses melalui <https://tempo.co>, sedangkan untuk alamat redaksinya, berlokasi di Jl. Palmerah Barat No. 8, Jakarta Selatan.

1.6.2 Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis, yakni sebuah pendekatan dalam ilmu sosial yang berpandangan bahwa realitas sosial tidak bersifat objektif dan universal, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi, bahasa, budaya, serta pengalaman kolektif (Denzin & Lincoln, 2018). Paradigma ini menempatkan

peneliti sebagai bagian dari proses penelitian, bukan sebagai pengamat yang sepenuhnya netral. Dalam konteks media, konstruktivisme memandang bahwa pemberitaan bukanlah refleksi obyektif dari suatu peristiwa, melainkan hasil konstruksi naratif yang dipengaruhi oleh kepentingan, ideologi, serta konteks sosial politik di mana media tersebut berada. Oleh karena itu, media berperan sebagai aktor sosial yang turut menciptakan makna melalui seleksi fakta, penekanan aspek tertentu, serta penggunaan bahasa yang membingkai peristiwa sesuai dengan kepentingan dan nilai yang dianutnya.

Paradigma konstruktivisme ini sangat relevan dengan kajian komunikasi, khususnya dalam studi framing media, karena ia memungkinkan peneliti untuk membongkar konstruksi realitas yang dibentuk media melalui narasi dan representasi tertentu. Dalam penelitian ini, pemberitaan Tempo.co mengenai RUU TNI tahun 2025 dipandang sebagai hasil konstruksi sosial yang tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga memproduksi wacana mengenai relasi sipil-militer, demokrasi, dan supremasi sipil. Media tersebut diposisikan bukan sebagai cermin realitas, tetapi sebagai pembentuk realitas itu sendiri. Oleh karena itu, pemberitaan tentang RUU TNI harus dianalisis dalam kerangka bagaimana Tempo.co membingkai, mengarahkan, dan bahkan membentuk pemahaman publik terhadap isu tersebut, bukan hanya apa yang dilaporkan tetapi juga bagaimana cara pelaporannya dikonstruksi.

Pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif interpretatif. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman terhadap makna yang tersembunyi di balik teks atau tindakan sosial, serta

bagaimana makna tersebut dikonstruksi dan dipertukarkan dalam konteks budaya dan sosial tertentu (Anggito & Setiawan, 2018). Pendekatan ini sangat sesuai untuk menganalisis framing media karena memungkinkan peneliti untuk menafsirkan struktur naratif dan ideologis di balik representasi isu yang dimuat oleh media. Tidak hanya menunjukkan bagaimana berita disusun, tetapi juga mengungkap struktur kekuasaan dan posisi ideologis media dalam ruang publik demokratis.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dalam kerangka paradigma konstruktivis, penelitian ini akan menganalisis teks berita secara mendalam untuk mengungkap konstruksi makna, logika wacana, serta relasi antara struktur bahasa dengan kepentingan sosial-politik tertentu. Tempo.co dipilih sebagai unit analisis karena reputasinya sebagai media yang independen, kritis, dan konsisten mengangkat isu-isu kebijakan publik yang kontroversial. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis atau mengukur variabel, tetapi untuk memahami dan menginterpretasi bagaimana media membingkai isu RUU TNI 2025 dalam konteks demokrasi, supremasi sipil, dan dinamika politik Indonesia. Pendekatan ini membuka ruang untuk analisis yang mendalam dan reflektif mengenai bagaimana media membentuk realitas melalui narasi, simbol, serta strategi diskursif yang memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan pertahanan yang sedang diperdebatkan

1.6.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis framing, dengan pendekatan konseptual dari Robert M. Entman (1993). Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan secara rinci bagaimana media membentuk

makna terhadap isu-isu sosial dan politik, melalui proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari sebuah realitas. Dalam konteks komunikasi politik, framing tidak hanya berfungsi sebagai strategi editorial, melainkan juga sebagai mekanisme pembentukan ideologi dan narasi yang memengaruhi persepsi publik. Entman (1993) menyatakan bahwa framing merupakan proses yang mencakup empat fungsi utama: analisis masalah (*define problem*), memperkirakan sumber masalah (*diagnose causes*), membuat keputusan moral (*make moral judgment*), penekanan penyelesaian masalah (*treatment recommendation*). Keempat dimensi ini menjadi kerangka kerja utama dalam penelitian ini untuk menganalisis teks berita secara mendalam.

Metode analisis framing ini digunakan untuk mengungkap bagaimana Tempo.co membingkai isu revisi Undang-Undang TNI tahun 2025 selama periode krusial 20 – 31 Maret 2025. Media dalam hal ini diposisikan tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor yang secara aktif membentuk realitas politik melalui struktur bahasa, seleksi narasumber, serta konteks penyajian. Dengan menggunakan model Entman, peneliti dapat menggali lebih dalam representasi isu yang ditonjolkan maupun disamarkan oleh media, sehingga tampak pola-pola naratif yang merefleksikan posisi ideologis Tempo.co terhadap relasi sipil dan militer. Dalam studi Eriyanto (2012), analisis framing terbukti menjadi alat yang sangat relevan dalam membaca kecenderungan media dalam konstruksi politik, terutama ketika media menghadapi dilema antara independensi editorial dan tekanan kekuasaan. Oleh karena itu, metode ini dinilai mampu memberikan

pemahaman yang komprehensif terhadap proses wacana media dalam isu strategis seperti kebijakan pertahanan nasional.

Metode analisis ini berfungsi tidak hanya untuk menjelaskan makna eksplisit dalam teks, tetapi juga mengungkap pesan-pesan implisit yang terkandung dalam struktur wacana media. Misalnya, bagaimana media membingkai institusi militer dalam kaitannya dengan nilai-nilai demokrasi, atau bagaimana media memilih untuk menonjolkan suara-suara tertentu (elite politik, LSM, atau akademisi) dalam pemberitaan mengenai RUU TNI. Dengan demikian, melalui metode ini, peneliti dapat menjelaskan sejauh mana Tempo.co memperkuat atau justru menantang narasi hegemonik yang berkembang di ruang publik. Setyanto & Winduwati (2019) dalam kajiannya juga menunjukkan bahwa framing media online memiliki kontribusi penting dalam membentuk opini publik, karena media digital cenderung bergerak lebih cepat dalam memengaruhi wacana dan persepsi masyarakat. Maka dari itu, metode analisis framing ini tidak hanya menjadi pendekatan teknis, tetapi juga alat kritis untuk membaca kekuatan simbolik media dalam menstrukturkan realitas politik dan kebijakan publik.

1.6.4 Jenis Data dan Sumber Data

1) Jenis Data

Dalam konteks penelitian kualitatif, data diartikan sebagai segala informasi yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sugiyono (2017) menyebutkan bahwa data adalah bahan mentah yang digunakan untuk menarik simpulan atau menjawab masalah penelitian. Sementara itu, menurut Taylor et al., (2016) data dalam pendekatan kualitatif biasanya berbentuk naratif

atau deskriptif, berupa kata-kata, kalimat, dokumen, atau simbol yang merepresentasikan makna tertentu dalam konteks sosial tertentu.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa teks berita daring dari Tempo.co. Data ini berupa naskah berita yang dianalisis secara mendalam menggunakan metode analisis framing model Entman. Data dipilih berdasarkan periode intensif pemberitaan, yaitu 17–25 Maret 2025, yang merupakan waktu krusial disahkannya Revisi Undang-Undang TNI oleh DPR RI.

2) Sumber Data

(1) Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah teks berita daring yang dipublikasikan oleh Tempo.co terkait pemberitaan pengesahan RUU TNI tahun 2025. Berita-berita tersebut diambil dalam rentang waktu 17 hingga 25 Maret 2025, yang merupakan periode di mana wacana legislasi ini menjadi perdebatan publik dan sorotan media nasional. Pemilihan Tempo.co sebagai sumber primer dilakukan karena posisinya sebagai media arus utama yang dikenal memiliki gaya jurnalisme kritis, independen, dan memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik (Ichtiari et al., 2024).

Data berupa teks berita ini akan dianalisis dengan menggunakan model framing Robert Entman, untuk mengungkap bagaimana Tempo.co mendefinisikan masalah, menentukan penyebab, memberikan penilaian moral, dan menyarankan solusi dalam menyampaikan informasi tentang RUU TNI kepada publik.

(2) Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer agar analisis memiliki akurasi yang lebih baik. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumentasi pendukung atau arsip naskah yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memberikan konteks tambahan dari isi berita yang dianalisis, memperkaya dan memperkuat interpretasi hasil analisis.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini merujuk pada objek konkret yang menjadi pusat observasi dan interpretasi peneliti, yakni teks-teks berita daring yang dipublikasikan oleh media online Tempo.co selama periode 17 hingga 25 Maret 2025. Periode ini dipilih secara purposif karena mencerminkan fase intensif pengesahan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang pada saat itu menuai beragam respons dari publik, aktor sipil, serta institusi militer. Dalam pendekatan kualitatif, unit analisis berfungsi sebagai pijakan dalam memahami konstruksi sosial yang ditampilkan dalam teks, serta makna yang tersembunyi di balik representasi media terhadap isu strategis tertentu (Miles et al., 2014).

Teks berita daring Tempo.co yang dianalisis dipilih berdasarkan kedekatannya dengan isu utama, yakni perdebatan mengenai perluasan fungsi militer dan implikasinya terhadap supremasi sipil dalam negara demokrasi. Analisis akan difokuskan pada struktur naratif teks berita yang mencakup elemen-elemen utama seperti pemilihan diksi, konstruksi judul dan lead, cara penyusunan informasi, serta sumber atau kutipan yang dihadirkan oleh media. Fokus tersebut sejalan dengan konsep framing dalam kajian media, yang menekankan bahwa

media tidak hanya menyampaikan realitas, tetapi juga menyaring dan menonjolkan aspek-aspek tertentu sesuai dengan nilai dan sudut pandangnya (Eriyanto, 2012).

Penelitian ini mengacu pada model framing Robert M. Entman (1993), yang mencakup empat fungsi analitis utama: pendefinisian masalah (problem definition), penentuan penyebab (causal interpretation), penilaian moral (moral evaluation), dan rekomendasi solusi (treatment recommendation). Keempat elemen ini akan digunakan untuk membaca bagaimana Tempo.co membingkai peran militer dalam konteks sipil, serta apakah media ini cenderung mendukung, netral, atau kritis terhadap kebijakan RUU TNI. Dengan menganalisis teks secara mendalam melalui kerangka Entman, penelitian ini bertujuan untuk menyingkap lapisan-lapisan ideologis dan wacana yang berperan dalam pembentukan opini publik terhadap isu militerisme dalam ranah demokratis.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi teks digunakan untuk mencermati struktur linguistik dan elemen wacana yang muncul dalam pemberitaan Tempo.co. Teknik ini dilakukan dengan memeriksa secara kritis penggunaan bahasa, seperti pemilihan kata kunci, alur narasi, struktur paragraf, hingga kutipan dari narasumber tertentu. Observasi terhadap teks bersifat interpretatif, karena peneliti berupaya menggali makna yang terkandung di balik susunan kalimat dan cara penyampaian informasi yang dipilih oleh redaksi media.

2) Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan sebagai metode utama dalam mengumpulkan data yang bersumber dari teks-teks berita daring. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari pemberitaan Tempo.co yang terbit selama periode 17–25 Maret 2025, yaitu saat wacana pengesahan Revisi Undang-Undang TNI menjadi perdebatan nasional. Data yang dikaji meliputi konten teks berita, struktur narasi, pemilihan diksi, kutipan sumber, dan konteks pemberitaan yang secara langsung berhubungan dengan topik revisi RUU TNI. Teknik dokumentasi dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengakses dokumen asli yang terdigitalisasi dan relevan.

Menurut Sugiyono (2017), dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah catatan tertulis atau visual yang mengandung informasi yang dibutuhkan untuk menjawab fokus penelitian. Dalam konteks ini, dokumen berupa teks berita daring dianggap sebagai representasi konstruksi media terhadap isu militerisme dan supremasi sipil yang sedang diteliti. Proses dokumentasi dilakukan secara sistematis, mulai dari identifikasi berita, pengunduhan teks, hingga pencatatan informasi penting dalam format tertata.

1.6.7 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin kredibilitas dan integritas hasil penelitian. Teknik keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Sugiyono, 2017).

Menurut (Moleong, 2019), triangulasi merupakan metode pengujian keabsahan data dengan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, dengan tujuan untuk mendapatkan keutuhan makna dan keterandalan hasil analisis.

1.6.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing dengan model konseptual yang dikembangkan oleh Robert N. Entman (1993). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana media membingkai isu tertentu melalui pemilihan, penonjolan, serta pengorganisasian elemen informasi dalam teks berita. Data yang dikumpulkan akan disusun dan organisasikan sesuai dengan empat unsur yang ada dalam model Robert N. Entman, yaitu: analisis masalah (define problem), memperkirakan sumber masalah (diagnose causes), membuat keputusan moral (make moral judgment), penekanan penyelesaian masalah (treatment recommendation).

1.6.9 Skema Penelitian

Tabel 1. 1 Skema Penelitian

